



PENETAPAN

Nomor 639/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kamburi, 15 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 April 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 639/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 25 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015, dan tercatat pada Kantor



Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/DN/XI/2019, tanggal 03 Desember 2019.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak sampai sekarang.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Termohon tidak mendengar saran Pemohon.
 - b. Termohon tidak mau bersifat terbuka kepada Pemohon bahkan sering mengambil keputusan sendiri.
 - c. Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri diantaranya malas mengerjakan pekerjaan rumah.
 - d. Termohon jarang bersilaturahmi dengan keluarga.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2019 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan

1. Mengabulkan permohonan pemohon. No. 639/Pdt.G/2020/PA.Mks



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *inpersoon* menghadapsendiri di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dan ternyata berhasil. Kemudian Pemohon bermohon secara lisan untuk mencabut kembali permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim, A. Hakam Musli m, SH., MH., namun ternyata mediasi tidak berhasil, akan tetapi di muka sidang Majelis Hakim secara maksimal mengupayakan perdamaian dan ternyata berhasil. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan akan kembali hidup rukun dan Pemohon bermohon untuk mencabut kembali permohonannya semula;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadap di muka

Hal. 3 dari 6, hal. Penetapan No. 639/Pdt.G/2020/PA.Mks



sidang, Majelis Hakim berhasil merukunkan kembali sehingga Pemohon bermohon untuk mencabut kembali permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara yang telah diajukan ke pengadilan adalah hak bagi setiap pihak yang mengajukan permohonan, *in casu* berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya dan bermohon agar permohonan pencabutannya dikabulkan, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara lebih lanjut tidak perlu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 639/Pdt.G/2020/PA.Mks dari Pemohon; *Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No. 639/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. Syarifuddin H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H. Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Syahrini, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan
No. 639/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Rp 20.000,-
- Panggilan Rp200.000,-
- Redaksi Rp 10.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan
No. 639/Pdt.G/2020/PA.Mks